

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Mengikuti prosedur *CIPP* model dari *Stufflebeam* (1976), bahwa evaluasi ini secara tetap berorientasi pada beberapa indikator antara lain yaitu *Context* (Konteks), *Input* (Masukan), *Process* (Process), dan *Product* (Hasil) dengan kesimpulan sebagai berikut;

##### 1. Indikator *Context* (Konteks)

Secara garis besar, berdasarkan data-data yang di dapatkan dari evaluasi *context* (konteks) menunjukkan bahwa program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta dengan studi kasus di SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 bisa dikatakan berjalan dengan baik pada indikator ini, dimana SD Negeri Baluwarti sudah memenuhi semua bagian penilaian mulai dari latar belakang program SSB, tujuan program SSB, struktur organisasi program, dan saran prasarana pelaksana program.

Sedangkan SD Negeri Bangunrejo hanya 1 bagian “struktur organisasi program” yang tidak ada dikarenakan pelaksanaan program SSB hanya sebatas diintegrasikan pada mata pelajaran di kelas. Instansi pemerintah dimana BPBD DIY selaku lembaga yang merancang dan mengkoordinasi pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) sehingga sangat mendominasi bagian *context* (konteks) ini terutama pada “latar belakang program”.

## 2. Indikator *Input* (Masukan)

Secara umum, berdasarkan data-data yang di dapatkan dari evaluasi *input* menunjukkan bahwa pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 bisa dikatakan cukup. Hal ini dikarenakan SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 sama-sama tidak ada yang memenuhi semua 4 bagian penilaian yaitu anggaran program, kurikulum program, peraturan program, dan pihak yang terlibat. SD Negeri Baluwarti tidak memenuhi bagian “peraturan program” dikarenakan memang mereka tidak menerapkan peraturan khusus dalam pelaksanaan program ini.

Sedangkan, SD Negeri Bangunrejo 1 tidak memenuhi bagian “kurikulum program” karena mereka hanya sebatas menyisipkan secara spontan saat mata pelajaran berlangsung dan juga tidak mempunyai “peraturan program SSB”. Instansi pemerintah dimana BPBD DIY selaku lembaga yang merancang dan mengkoordinasi pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) sehingga memenuhi 4 bagian penilaian tersebut.

## 3. Indikator *Process* (Proses)

Secara umum, berdasarkan data-data yang di dapatkan dari evaluasi *process* menunjukkan bahwa pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 bisa dikatakan baik. Hal ini dikarenakan kedua sekolah sama-sama sudah memenuhi 2 (dua) dari 3 (tiga) bagian penilaian yaitu jenis kegiatan

program, target waktu program, dan penanggungjawab program. Kedua sekolah sama-sama tidak memenuhi pada bagian penilaian “target program” dikarenakan mereka melakukan kegiatan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) bersifat *continue* “berkelanjutan” tanpa ada batas target waktu tertentu.

Sedangkan untuk jenis kegiatan, SD Negeri Baluwarti masih melakukan simulasi setahun 1 (satu) kali dan menjalankan kurikulum pendidikan kebencanaan di kelas. SD Negeri Bangunrejo 1 lebih fokus pada jenis kegiatan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) yang disisipkan pada mata pelajaran di kelas. Instansi pemerintah dimana BPBD DIY menjelaskan beberapa jenis kegiatan yang dilakukan selama proses persiapan sampai peresmian (*lauching*) mulai dari evaluasi kerawanan daerah terhadap bencana alam sampai simulasi sekaligus peresmian. Untuk target kegiatan, BPBD DIY mengharapkan tidak ada target alias berkelanjutan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) ini.

#### 4. Indikator *Product* (Hasil)

Secara umum, berdasarkan hasil berdasarkan data-data yang di dapatkan dari evaluasi *product* menunjukkan bahwa pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 bisa dikatakan sangat baik. Hal ini dikarenakan dampak yang di dapat oleh sasaran program ini sangat positif, dimana mereka merasa bahwa pendidikan kebencanaan melalui program Sekolah Siaga Bencana (SSB) mampu meningkatkan sikap tangguh dalam menghadapi

bencana terutama untuk anak-anak yang terkenal rentan menjadi korban jika bencana alam terjadi. Akan tetapi, ada beberapa kendala yang dirasakan oleh kedua sekolah ini yaitu anggaran dan keterbatasan waktu dalam melaksanakan program Sekolah Siaga Bencana (SSB).

Meskipun beberapa komponen program Sekolah Siaga Bencana (SSB) telah terlaksana, ada beberapa komponen yang belum terpenuhi, yaitu:

1. Pada bagian *Context* (Konteks), komponen struktur organisasi pelaksana program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Bangunrejo 1 belum ada. Padahal hal tersebut merupakan salah satu pelengkap pelaksanaan program SSB tersebut.
2. Pada bagian *Input* (Masukan), komponen kurikulum dan peraturan khusus terkait pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Bangunrejo 1 belum ada. Selain itu, SD Negeri Baluwarti juga belum memiliki peraturan khusus terkait pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB).
3. Pada bagian *Process* (Proses), komponen target waktu dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Bangunrejo 1 dan SD Negeri Baluwarti belum ada karena memang program ini bersifat “berkelanjutan” sesuai yang diharapkan oleh BPBD DIY jadi tidak ada target waktu kapan selesainya.

Berdasarkan hasil evaluasi *CIPP* model yang mengidentifikasi tentang keberhasilan Program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta

dengan studi kasus SD Negeri Bangunrejo 1 dan SD Negeri Baluwarti, maka dapat dilihat bahwa untuk SD Negeri Baluwarti lebih unggul pada indikator *Context* (Konteks) dimana sudah memenuhi 4 komponen penilaian dan indikator *Process* (Proses) dimana kegiatan program masih aktif mulai dari simulasi sampai pembelajaran di kelas. Sedangkan untuk SD Negeri Bangunrejo 1 masih tetap menjalankan program Sekolah Siaga Bencana (SSB), hanya saja masih sebatas pada pembelajaran di kelas. Akan tetapi, para siswa tetap mendapatkan pendidikan kebencanaan yang baik sesuai tujuan dari diadakkannya program Sekolah Siaga Bencana (SSB).

## **1.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran baik untuk instansi pemerintahan yang terkait, pihak yang terlibat, serta bagi penelitian selanjutnya yang jenis sebagai berikut;

1. SD Negeri Bangunrejo 1 agar segera membuat struktur organisasi khusus dalam pengembangan dan pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di sekolah walaupun belum mengadakan simulasi kembali. Selain itu juga diharapkan segera membuat kurikulum khusus terkait pendidikan kebencanaan agar kegiatan proses belajar mengenai kebencanaan dapat berjalan terarah.
2. SD Negeri Baluwarti diharapkan agar terus mengembangkan pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) walaupun belum memiliki peraturan khusus terkait pelaksanaan tersebut.

3. BPBD DIY agar kedepannya BPBD DIY lebih sering lagi mengadakan simulasi kebencanaan sehingga tidak hanya saat simulasi menjelang peresmian saja. Simulasi lanjutan minimal setahun 2-3 bisa menjadi penyemangat warga lingkungan sekolah pelaksana program Sekolah Siaga Bencana (SSB) untuk menerapkannya kepada para murid. Selain itu, diharapkan BPBD DIY mengalokasikan dana khusus untuk pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) lebih lanjut lagi terutama untuk mendanai simulasi kegiatan agar pihak sekolah yang melaksanakan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) tersebut lebih lancar tanpa kendala dana. Perlu adanya komunikasi lebih mendalam dengan pihak-pihak terlibat di luar BPBD DIY agar pelaksanaan program ini tidak tumbang tindih.